BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Presepsi yang disebarkan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan Indonesia adalah akuntansi pemerintahan pengganti akuntansi sektor publik, pada umumnya sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara,dan industri nasional (perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, perusahaan publik) (Indra Bastian, 2006:16).

Penyelenggaraan organisasi pemerintah pada awalnya dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah, namun karena pertumbuhan penduduk suatu negara termasuk daerah semakin pesat dari kebutuhan perubahan kelayakan kehidupan masyarakat lokal semakin meningkat, maka kebutuhan desentralisasi urusan pemerintahan ke daerah tidak dapat dielakan (Masama, 2012:2)

Sebagai organisasi sekor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan (Fifit, 2016).

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah (Lucy auditya, 2013).

Kinerja merupakan gambaran pencapaian suatu kegiatan program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sasaran pencapaian yang ingin di peroleh suatu organisasi dijabarkan ke dalam perumusan *strategic planning* atau perencanaan strategis (Ori darpito, 2015).

Tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan kinerja pemerintah menjadi salah satu isu yang menjadi sorotan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya, 2013).

Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas atas dasar kualitas pelayanan yang diberikan (Muhammad kurniawan, 2013).

Melalui pengukuran kinerja akan nampak profesionalisme seorang pegawai dalam implementasi kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk

melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. (Greiling, 2005)

Informasi penilaian kinerja tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengelola kinerja pegawainya dan mengungkapkan kinerja bawahannya sehingga pimpinan dapat menentukan tujuan maupun target yang harus diperbaiki. Penilaian kinerja digunakan untuk melihat performance dari pegawai itu sendiri. Yang menjadi indikator penilaian kinerja adalah uraian kerja. Bila pekerjaan sesuai atau melebihi uraian pekerjaan maka dapat dikatakan berhasil dan begitu juga sebaliknya apabila pelaksanaan pekerjaan di bawah uraian pekerjaan yang telah ditentukan maka pekerjaan itu kurang berhasil (Junus kweju, 2004).

Hubungan pekerjaan antara pegawai dan pimpinan juga dapat membuat dampak penting untuk mencapai keefektifan organisasi (Sunarto, 2005).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Fred Luthan, 2006).

Permasalah kinerja yang dihadapi oleh Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah kabupaten bandung barat, menurut Direktur pusat kajian politik ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) Holid Nurjamil menilai perolehan nilai C untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah kabupaten bandung barat melalui Laporan kinerja pegawai (LAKIP) Pasalnya, hasil

penilaian tersebut merupakan salah satu indikator baik buruknya kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara untuk itu pemerintah kabupaten bandung barat harus segera melakukan perbaikan yang mendasar di berbagai aspek. Misalnya pada aspek perencanaan, pelaporan dan pencapaian kinerja. (Holid,2017)

Komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya visi dan misi. Pimpinan yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasinya (Porter, 2009).

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang Individu memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu.(Ikhsan dan ishak, 2005).

Penilaian terkait Kinerja Pemerintah Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat oleh Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan yaitu Holid Nurjamil, memperoleh nilai C untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) hasil penilaian tersebut merupakan salah satu indikator baik buruknya kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara. Namun berbeda dengan informasi dari Cecep M selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian bahwa Komitmen Organisasi di lapangan telah cukup baik dengan adanya program-program dari tiap-tiap SKPD misalnya dengan memberikan suatu program-program

yang dibuatkan untuk pelayanan terhadap publik sehingga sehingga mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih baik untuk kedepannya.(Cecep M, 2017)

Pengukuran kinerja instansi pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006).

Perkembangan sektor publik di indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3(tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah agar lebih responsive, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan (Mardiasmo, 2006).

Era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas *(accountability)* dan keterbukaan *(transparancy)* dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik *(Good Governance).* Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative* (Akbar,2012).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Asman mengatakan, masih rendahnya tingkat akuntabilitas Kabupaten/kota terjadi

karena empat masalah. Selain karena tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, program atau kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan kegiatan. Namun yang terjadi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait akuntabilitas pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengungkapkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada kota/kabupaten (Kokab) dibandingkan tahun sebelumnya termasuk kabupaten bandung barat Pada tahun 2016, rata-rata nilai evaluasi SAKIP Kokab adalah 49,87, meningkat dari tahun 2015 yang hanya 46,92, atau mengalami peningkatan sebanyak 2,95 poin.

Dalam penelitian wiguna menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan tehadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintah (Wiguna, 2013).

Akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan

keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Fifit, 2016).

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Auditya et al, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Auditya.,2015) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maka akan semakin meningkatkan kinerja.

Penelitian ini didukung oleh penelitian (Devi Satria,2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Koefisien regresi (β3) untuk komitmen organisai sebesar 0,188 menunjukkan bahwa setiap kenaikan komitmen organisasi sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebesar 18,8%. Pengaruh yang dihasilkan antara komitmen organisasi dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu positif. Artinya bila komitmen organisasi meningkat 1% maka kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga akan naik sebesar 18,8%.

Komitmen dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Komitmen yang tinggi dari individu

organisasi akan menjadikan individu berusaha keras untuk mencapai tujuan guna meningkatkan kinerja organisasi. Komitmen organisasi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Aceh Selatan sangat ditentukan oleh komitmen masing-masing aparatur untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada (Devi satria, 2014).

Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian (Baihaqi, 2012) yang memberikan kesimpulan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah SKPD.

Tetapi penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anurti dkk, 2013) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini juga mengacu pada penelitan (agung istri, 2014) Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana nilai koefisien regresi □2 = 0,519. Dapat diinterprestasikan bahwa setiap satu poin peningkatan akuntabilitas maka secara relatif akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,519 poin. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD pada Kabupaten Aceh Utara sudah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan akuntabilitas sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Hasil penelitian ini mendukuug penelitian yang dilakukan oleh (Auditya, 2013) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah SKPD. Tetapi berbeda dengan penelitian (Amril, 2014) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa

akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Pemerintah daerah SKPD.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **"Pengaruh Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**"

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Komitmen organisasi di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah meningkat namun dalam kinerja masih terdapat masalah yaitu terkait baik buruknya kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sudah ada peningkatan namun dalam aspek pencapaian kinerja masih terdapat empat masalah yaitu : tujuan atau sasaran tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan belum terukur, program atau kegiatan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
3. Kinerja SKPD Kabupaten Bandung Barat masih belum optimal untuk itu Pemrintah kabupaten bandung barat harus melakukan perbaikan diberbagai aspek perencanaan, pelaporan, dan pencapaian kinerja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Komitmen organisasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah
2. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dilapangan mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi dan Akuntablititas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

1.5 Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh komitmen organisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi, melengkapi hasil penelitian sebelumnya, serta bagi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang sama.